

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI

Deva Alvina¹⁾, Amri Amir²⁾, Yudi³⁾

¹⁾Alumni Magister Ilmu Akuntansi Pascasarjana Universitas Jambi 2018

^{2,3)}Dosen Pembimbing

ABSTRACT

This research aims to analyze financial performance local governments of Jambi city. The results on the effectiveness ratio of PAD of Jambi shows that the financial performance of Jambi city government has been effective, the efficiency level of Jambi municipal efficiency is less efficient, the Jambi city government's harmony ratios show the amount of operating expenditure is greater than the capital expenditure, Operations such as grant expenditure and social assistance expenditure indicate that the proportion of these two expenditures is greater at the time of the election of the Head of Region, the growth ratio PAD Local Government of Jambi City showed positive. Capital expenditure growth, average operating expenditure is 38,62% and 11,37%. the growth of local government of Jambi city shows a positive result, the level of financial independence of Jambi city is still very dependent on funds transfer from the center and province.

Keywords: *Regional Autonomy, Financial Performance, Regional Financial*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian ini pada rasio efektivitas PAD Kota Jambi menunjukkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi sudah efektif, tingkat efisiensi keuangan daerah kota Jambi kurang efisien, rasio keserasian Pemerintah Daerah kota Jambi menunjukkan jumlah belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal, Belanja Operasi yang diantaranya adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial menunjukkan bahwa proporsi kedua belanja ini lebih besar pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah, rasio pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi menunjukkan hasil positif. Pertumbuhan belanja modal, belanja operasi rata-rata sebesar 38,62% dan 11,37%. Tingkat kemandirian keuangan daerah Kota masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan Propinsi.

Kata Kunci: Otonomi Daerah, Kinerja Keuangan, Keuangan Daerah.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) yang langsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial masyarakat. Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi Pemerintah Daerah (Syauqi, 2016).

Struktur APBD Kota Jambi selama 6 (Enam) tahun anggaran tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Pada sisi pendapatan menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi penerimaan Daerah dibandingkan dengan PAD. Hal ini mengindikasikan masih tingginya ketergantungan fiskal Pemerintah Daerah kota jambi terhadap Pemerintah Pusat selama kurun waktu 2011-2016 kendati paket otonomi Daerah telah digulirkan. Pada sisi belanja kebutuhan belanja Daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini merupakan dampak dari kewenangan otonomi Daerah dimana Pemerintah Daerah secara aktif dan lebih leluasa melakukan pembiayaan dalam upaya pengembangan segala bentuk aktifitas program-program pembangunan di daerah.

Analisis kinerja keuangan bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja Pemerintah, mengukur potensi pendapatan atau sumber ekonomi, mengetahui kondisi keuangan, mengetahui kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya, dan menyakini bahwa Pemerintah telah melaksanakan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan adalah dengan rasio keuangan (Wonda,2016).Hasil analisis rasio keuangan digunakan untuk tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi Daerah, mengukur efektifitas dalam merealisasikan pendapatan asli Daerah, mengukur efisiensi dalam melakukan pengeluaran yang dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya dan memenuhi dari apa yang direncanakan, mengukur sejauh mana aktifitas Pemerintah dalam membelanjakan pendapatan Daerahnya untuk belanja modal, dan mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan komponen dalam pendapatan asli Daerah dari pajak Daerah dan retribusi Daerah (Tarmizi,2014)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti merumuskan masalah yang menjadi dasar penyusunan tesis adalah “Bagaimana kinerja keuangan di Pemerintah Daerah Kota Jambi dilihat dari Rasio efektivitas PAD, Rasio Efisiensi keuangan daerah, Rasio keserasian, Rasio pertumbuhan dan Rasio kemandirian Keuangan Daerah?

2. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah, Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup keuangan Daerah meliputi:

1. Hak Daerah untuk memungut pajak Daerah dan retribusi Daerah serta melakukan pinjaman;
2. Kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Daerah;
4. Pengeluaran Daerah;
5. Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Daerah;
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum

2.1.2 Laporan Keuangan

Menurut PP nomor 71 tahun 2010 paragraf 24-25, laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

2.1.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Syauqi,2016).

Salah satu alat menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan Daerahnya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Hasil analisis rasio keuangan ini bertujuan untuk:

- a. Menilai kemandirian keuangan Daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi Daerah
- b. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan Daerah
- c. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan Daerahnya
- d. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan Daerah
- e. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu (Sucandrawati, 2016).

2.1.4 Otonomi Daerah

Menurut undang-undang No. 23 tahun 2014 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.1.5 Teori Keagenan

Teori keagenan atau teori prinsipel-agen adalah teori yang menjelaskan hubungan antara pihak pemberi dengan pihak penerima hak dan kewajiban, yang diikat dengan perjanjian atau kontrak. Pihak pemberi hak dan kewajiban disebut prinsipal, sedang pihak penerima hak dan kewajiban disebut agen. Pada perjalanannya, agen memiliki keleluasaan dengan adanya asimetri informasi, sehingga dapat melakukan kegiatan yang mengakibatkan dirinya mendapatkan hak lebih besar dari yang sewajarnya, hal inilah yang mendasari perilaku oportunistik atau perilaku yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan salah satu pihak tertentu. Teori keagenan juga dapat menjelaskan hubungan para pihak dalam sektor pemerintahan, legislatif sebagai prinsipal dan eksekutif sebagai agen. Hubungan ini dapat menyebabkan perilaku oportunistik bagi eksekutif mengingat eksekutif sebagai perancang anggaran sekaligus sebagai pelaksana anggaran (Riharjo dan Isnadi, 2010)

2.1.6 Proses Penyusunan Anggaran Pemerintah

Bab VIII UUD tahun 1945 mengamanatkan kepada Presiden/lembaga eksekutif untuk menyusun rancangan UU APBN. Sedangkan Proses penyusunan APBN/APBD telah diatur dalam UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan secara teknis proses penyusunan APBD telah diatur dalam Permendagri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Permendagri No 13 Tahun 2006

memberikan tugas dan wewenang kepada Kepala Daerah/lembaga eksekutif menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Tahapan terpenting pada proses penyusunan APBN maupun APBD adalah penyusunan rancangan APBN/APBD oleh eksekutif, penetapan oleh eksekutif dan legislatif, dan pelaksanaan oleh eksekutif (Riharjo dan Isnadi, 2010).

2.1.7 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran merupakan suatu alat untuk perencanaan dan pengawasan operasi keuntungan dalam suatu organisasi laba dimana tingkat formalitas suatu budge tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas di atas, tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian dari gambaran tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan dan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisa dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan-kemungkinan, alternatif-alternatif dan konsekwensi yang ada sehingga dapat didefinisikan (Hanum, 2011).

Pada prinsipnya anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu. Dalam Peraturan Mendagri No. 13 tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.1.8 Laporan Realisasi Anggaran

Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung oleh laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan

2.1.9 Analisis Kinerja Keuangan

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan (Mahmudi 2016:141).

b. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Pengukuran tingkat efisiensi mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan (Bisma dan Hery,2010).

c. Rasio Keserasian

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja Pembangunannya secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk Belanja Rutin berarti persentase Belanja investasi (Belanja Pembangunan) yang digunakan untuk menyediakan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil. Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal (Fathah, 2017).

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian Abdul Halim (2007) dalam (Fathah, 2017).

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman Abdul Halim (2007) dalam Fathah (2017).

2.2 Kerangka pemikiran

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala Daerah bertanggung jawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala Daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal – hal yang menyangkut pertanggung jawabannya (Oktarina, Raharjo, & Andini, 2016).

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran (Syauqi,2016).

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode. Anggaran dapat juga dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial, pembuatan anggran dalam organisasi sector public, terutama pemerintah, merupakan sebuah proses yang cukup rumit dan mengandung muatan politis yang cukup signifikan (Nordriawan,2007:19).

Pada prinsipnya anggaran atau yang biasa kita sebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah gambaran dari kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan dalam ukuran uang, yang meliputi kebijakan penerimaan pemerintah daerah serta realisasi anggaran tahun yang lalu. Dalam Peraturan Mendagri Nomor 13 tahun 2006 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini Pemerintah Daerah Kota Jambi. Sampel dalam penelitian ini adalah Pemerintah Daerah Kota Jambi. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi yakni salah satunya adalah laporan realisasi anggaran Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun tahun Anggaran 2011-2016.

3.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan menggunakan rasio efektivitas PAD, rasio efisiensi, rasio keserasian, rasio pertumbuhan dan rasio kemandirian keuangan Daerah.

3.3 Teknik Analisis Data

a. Rasio Efektivitas PAD

Rasio efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD (Dianggarkan). ditargetkan (Mahmudi 2016:141).

b. Rasio Efisiensi

Pengukuran tingkat efisiensi ini untuk mengetahui seberapa besar efisiensi dari pelaksanaan suatu kegiatan dengan mengukur input yang digunakan dan membandingkan dengan output yang dihasilkan yang memerlukan data-data realisasi belanja dan realisasi pendapatan (Bisma dan Hery,2010).

c. Rasio Keserasian

Ada dua perhitungan dalam Rasio Keserasian ini, yaitu : Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal (Fathah, 2017). Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total belanja operasi dengan total belanja daerah. Analisis belanja modal terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja daerah (Mahmudi, 2016:162).

d. Rasio Pertumbuhan

Rasio ini mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapatkan perhatian Abdul Halim (2007) dalam (Fathah, 2017).

e. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak sumber daya alam, dana alokasi umum dan alokasi khusus, dana darurat dan pinjaman Abdul Halim (2007) dalam Fathah (2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD Kota Jambi untuk tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Rasio Tingkat Efektivitas PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi PAD	Anggaran PAD	Persentase	Kategori
2011	98,999,978,722.48	85.821.530.834.00	115.36	Sangat Efektif
2012	113,090,049,195.12	91,179,957,018.00	124.03	Sangat Efektif
2013	149,041,969,818.21	132,910,979,710.00	112.14	Sangat Efektif
2014	246,427,699,826.28	196,639,197,900.00	125.32	Sangat Efektif
2015	263,925,520,119.42	305,138,943,000.00	86.49	Cukup Efektif
2016	287,525,214,004.49	316,463,773,600.00	90.86	Efektif
Total			642.54	
Rata-rata			107,09	Sangat Efektif

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel perhitungan efektivitas PAD Kota Jambi tahun 2011-2016, dapat dilihat bahwa PAD Kota Jambi sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-

rata tingkat efektivitas PAD Kota Jambi sebesar 107,09 %. Pada tahun 2011-2013 tingkat efektivitas PAD Pemerintah Kota Jambi sangat efektif ini menunjukkan bahwa penerimaan PAD Sesuai dengan target yang sudah ditetapkan, sedangkan pada tahun 2014-2016, tingkat efektivitas PAD berbeda setiap tahunnya. Pada tahun 2014 tingkat efektivitas PAD meningkat dari tahun sebelumnya yakni sebesar 13,18%, pada tahun 2015 rasio efektifitas PAD mengalami penurunan sebesar 38,83% , dan pada tahun 2016 kembali meningkat sebesar 4,36%. Dari tahun 2011-2016 tingkat efektivitas PAD tertinggi terjadi pada tahun 2011 sebesar 115,36% dan tingkat efektivitas PAD terendah terjadi pada tahun 2015 yakni sebesar 86.49%.

4.2 Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Rasio Tingkat Efisiensi Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi 2011-2016

Tahun	Realisasi		Hasil	Kategori
	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah		
2011	852,846,534,124.91	869,966,667,732.31	98.03	Kurang Efisien
2012	1,031,313,340,884.89	1,083,917,282,197.71	95.15	Kurang Efisien
2013	1,149,030,602,043.00	1,164,352,547,296.00	98.68	Kurang Efisien
2014	1,276,975,539,348.50	1,320,648,890,197.28	96.69	Kurang Efisien
2015	1,425,607,446,320.80	1,387,222,252,820.42	102.77	Tidak Efisien
2016	1,525,413,835,576.45	1,571,332,218,626.47	97.08	Kurang Efisien
Rata-rata			98.07	Kurang Efisien

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel di atas rata-rata tingkat efisiensi keuangan Daerah dari tahun 2011-2016 sebesar 98,07 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi kurang efisien. Pada tahun 2015 tingkat efisiensi keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 102,77 %. Ini menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh sehingga dari tahun 2011-2016 pada tahun 2015 ini kinerja Pemerintah Daerah Kota Jambi tidak efisien.

4.3 Rasio Keserasian

Tingkat belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Rasio Keserasian Tingkat Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi		Persentase
	Belanja Operasi	Belanja Daerah	
2011	700,422,095,025.91	852,846,534,124.91	82.13
2012	782,526,154,092.24	1,031,313,340,884.89	75.88
2013	875,323,539,165.00	1,149,030,602,043.00	76.18
2014	980,385,356,153.50	1,276,975,539,348.50	76.77
2015	1,039,930,202,333.00	1,425,607,446,320.80	72.95
2016	1,100,135,850,737.50	1,525,413,835,576.45	72.12
Rata-rata			76.00

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel tingkat belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 rata-

rata sebesar 76,00%. Pemerintah Daerah dengan tingkat pendapatan yang tinggi cenderung memiliki porsi belanja operasi yang lebih tinggi dibandingkan Pemerintah Daerah yang tingkat pendapatannya rendah. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat semakin kecil Halim (2012) dalam (Prmono, 2014). Tingkat belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi terjadi pada tahun 2011 sebesar 82,13 %. Ini menunjukkan bahwa belanja investasi (belanja pembangunan) yang dipakai untuk menyediakan sarana prasarana ekonomi masyarakat kecil. Sedangkan tingkat belanja operasi terendah terjadi pada tahun 2015 sebesar 72,12 %.

Belanja operasi diantaranya terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. KPK menemukan adanya relasi dana bansos dan hibah APBD terkait pelaksanaan pemilukada. KPK juga menemukan kecenderungan dana hibah mengalami kenaikan menjelang pelaksanaan pemilukada yang terjadi pada kurun 2011-2013. Selain itu, didapati juga fakta banyaknya tindak pidana korupsi yang diakibatkan penyalahgunaan kedua anggaran tersebut (Budi, 2014).

Tabel 4
Tingkat Belanja Hibah Pemerintah Daerah
Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi		Persentase
	Belanja Hibah	Belanja Daerah	
2011	15.201.930.654.00	852.846.534.124.91	1.78
2012	8.202.223.300.00	1.031.313.340.884.89	0.80
2013	41.332.686.558.00	1.149.030.602.043.00	3.60
2014	3.791.283.500.00	1.276.975.539.348.50	0.30
2015	5.627.038.649.00	1.425.607.446.320.80	0.39
2016	26.133.087.504.00	1.525.413.835.576.45	1.71
Rata-rata			1.4

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel perhitungan tingkat belanja hibah Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 rata-rata sebesar 1,4 %, Persentase belanja hibah tertinggi terjadi pada tahun 2013 sebesar 3,60% dan terendah pada tahun 2014 yakni sebesar 0,30%. Persentase kenaikan dan penurunan belanja hibah Pemerintah Daerah kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5
Persentase Kenaikan dan Penurunan Tingkat
Belanja Hibah Pemerintah Daerah Kota Jambi
Tahun 2011-2016

Tahun	Tingkat Belanja Hibah (%)	Persentase Kenaikan dan Penurunan	Keterangan
2011	1.78		
2012	0.80	0.99	Menurun
2013	3.60	2.80	Meningkat
2014	0.30	3.30	Menurun
2015	0.39	0.10	Meningkat
2016	1.71	1.32	Meningkat

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas kenaikan tertinggi belanja hibah terjadi pada tahun anggaran 2013 yakni Rp. 41.332.686.558,00 dengan tingkat persentase sebesar 2,80 % dan penurunan belanja hibah terjadi pada tahun 2014 sebesar Rp. 3.791.283.500,00 dengan tingkat persentase 3,30%.

Menurut peraturan Walikota Jambi nomor 26 tahun 2016 bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Tabel 6
Rasio Tingkat Belanja Bantuan Sosial Pemerintah
Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi		Realisasi
	Belanja Bantuan Sosial	Belanja Daerah	
2011	4.680.747.829.19	852.846.534.124.91	0.55
2012	-	1.031.313.340.884.89	-
2013	2.436.830.000.00	1.149.030.602.043.00	0.21
2014	4.282.750.000.00	1.276.975.539.348.50	0.34
2015	3.645.000.000.00	1.425.607.446.320.80	0.26
2016	1.557.150.000.00	1.525.413.835.576.45	0.10
Total			1.45
Rata-rata			0.24

Sumber: Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas rata-rata belanja bantuan sosial sebesar 0,24%. Belanja bantuan sosial terendah pada tahun 2012 yaitu Rp 0,00 dengan persentase 0,00% dan belanja bantuan sosial tertinggi dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 terjadi pada tahun 2011 sebesar Rp. 4.680.747.829,19 dengan persentase 0,55 %. Persentase kenaikan dan penurunan belanja bantuan sosial Pemerintah Daerah Kota Jambi dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7
Persentase Kenaikan dan Penurunan Tingkat
Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Daerah
Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Persentase (%)	Persentase Kenaikan dan Penurunan	Keterangan
2011	0.55		
2012	-	0.55	Menurun
2013	0.21	0.21	Meningkat
2014	0.34	0.12	Meningkat
2015	0.26	0.08	Menurun
2016	0.10	0.15	Menurun

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas tingkat belanja sosial Pemerintah Daerah Kota Jambi pada tahun 2011 ke tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 0,55% dimana pada tahun 2012 tidak ada realisasi belanja bantuan sosial. pada tahun 2013 belanja bantuan sosial meningkat sebesar 0,21%, Pada tahun 2014 meningkat sebesar 0,12%, Kembali menurun pada tahun 2015 dan tahun 2016 yakni sebesar 0,08% dan 0,15%. Persentase kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yakni sebesar 0,21 %. Pada tahun 2013 persentase belanja hibah dan bantuan sosial meningkat yakni sebesar 3,60 % belanja hibah dan 0,21% belanja bantuan sosial.

Persentase peningkatan belanja hibah dan belanja bantuan sosial bersamaan dengan mencalonkan kembali Walikota dan wakil Walikota periode 2008-2013 yakni oleh dr.H.R.Bambang Priyanto dan M.Sum Indra, SE., M.Si. Rasio tingkat belanja modal Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 8
Rasio Tingkat Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Realisasi		Persentase
	Belanja Modal	Belanja Daerah	
2011	150,862,759,070.00	852,846,534,124.91	17.69
2012	248,436,667,092.65	1,031,313,340,884.89	24.09
2013	273,218,494,378.00	1,149,030,602,043.00	23.78
2014	385,128,743,987.80	1,276,975,539,348.50	30.16
2015	723,033,065,843.80	1,425,607,446,320.80	50.72
2016	424,195,954,889.95	1,525,413,835,576.45	27.81
Rata-rata			29.04

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan tabel diatas rata-rata tingkat belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 adalah 29.04 %. Tingkat belanja operasi tertinggi terjadi pada tahun 50,72%, dan terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 17.69 %. Belanja modal memberikan manfaat jangka menengah dan panjang juga bersifat rutin. Berikut ini perbandingan belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016.

Tabel 9
Perbandingan Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal
2011	82.13	17.69
2012	75.88	24.09
2013	76.18	23.78
2014	76.77	30.16
2015	72.95	50.72
2016	72.12	27.81
Rata-rata	76,00	29,04

Sumber : Hasil pengolahan data

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada Pemerintah Daerah Kota Jambi dapat dilihat bahwa jumlah belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal. Ini menunjukkan bahwa belanja Daerah didominasi oleh belanja operasi dengan meningkatnya pendapatan Daerah.

4.4 Rasio Pertumbuhan

Berdasarkan tabel dibawah ini rata-rata pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi sebesar 27,86%. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Daerah Kota Jambi dalam mempertahankan dan meningkatkan perolehan PAD dari tahun 2011 ke Tahun 2016 sebesar 27,86%. Pemerintah Daerah Kota Jambi harus selalu meningkatkan PAD nya dengan cara

mengoptimalkan berbagai macam potensi yang dimilikinya. Akan lebih baik apabila tidak terlalu bergantung pada bantuan dari Pemerintah pusat agar bisa mandiri mengelola Daerahnya dengan PAD yang tinggi. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 sebesar 14,91 %. Rasio Pertumbuhan PAD tumbuh secara positif dengan rata-rata 27,86% lebih baik bila dibandingkan dengan rata-rata Pertumbuhan pendapatan daerah yakni sebesar 14,91 %. Rata-rata pertumbuhan belanja operasi Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 sebesar 11,37%. Rata-rata pertumbuhan belanja modal Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 sebesar 38,62%. Belanja modal pada tahun 2016 mengalami trend negatif sebesar -41,33%. Hal ini disebabkan jumlah belanja modal pada tahun 2015 lebih besar dari pada tahun 2016. Berarti Pemerintah Daerah belum mengoptimalkan pembangunan Daerah dan cenderung mengalokasikan pendanaanya pada Belanja Operasi pada tahun tersebut

Rasio pertumbuhan Pemerintah Kota Jambi pada tahun 2011-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Pertumbuhan			
	PAD	Pendapatan Daerah	Belanja Modal	Belanja Operasi
2011	39.7	25.69	69.72	20.75
2012	14.23	24.59	64.68	11.72
2013	31.79	7.42	9.98	11.86
2014	65.3	13.42	40.96	12.00
2015	7.10	5.04	87.74	6.07
2016	8.9	13.27	(41.33)	5.79
Total	167.2	89.4	231.7	68.2
Rata-rata	27.86	14.91	38.62	11.37

Sumber: Hasil pengolahan data

4.5 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Tahun 2011-2016.

Tabel 11
Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2011-2016

Tahun	Pendapatan Transfer	Realisasi PAD	RKKD	Pola Hubungan
2011	765,781,089,009.83	98,999,978,722.48	12.9	Instruktif
2012	903,954,112,502.59	113,090,049,195.12	12.5	Instruktif
2013	1,005,078,696,203.00	149,041,969,818.21	14.8	Instruktif
2014	1,064,949,342,896.00	246,427,699,826.28	23.1	Instruktif
2015	1,115,296,732,701.00	263,925,520,119.42	23.7	Instruktif
2016	1,244,767,208,043.98	287,525,214,004.49	23.1	Instruktif
Total			110.2	
Rata-rata			18.36	Instruktif

Sumber : Hasil pengolahan data

Dari tabel perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011- 2016, dapat dilihat bahwa tingkat kemandirian keuangan Daerah Kota Jambi masih sangat rendah dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan

pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan Pemerintah Daerah, ini dapat dilihat dari rasio kemandirian keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0% -25%. Rata-rata tingkat kemandirian keuangan Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 adalah 18.36%.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi. Setelah analisis data yang diuraikan pada bab IV dalam penelitian ini, maka dapat di ambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Kinerja keuangan dilihat dari Rasio efektivitas PAD Kota Jambi tahun 2011-2016, dapat dilihat bahwa Kinerja Keuangan PAD Kota Jambi sudah efektif. Hal ini ditunjukkan dengan rata-rata tingkat efektivitas PAD Kota Jambi sebesar 110,86 %.
2. Kinerja keuangan dilihat dari rasio efisiensi keuangan Daerah dari tahun 2011-2016 sebesar 98,07 %. Ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi keuangan Daerah Kota Jambi kurang efisien.
3. Kinerja keuangan dilihat dari rasio keserasian Pemerintah Daerah kota Jambi menunjukkan jumlah belanja operasi lebih besar dibandingkan belanja modal dengan rata-rata belanja operasi sebesar 76,00% dan belanja modal 29,04%. Belanja Operasi yang diantaranya adalah belanja hibah dan belanja bantuan sosial menunjukkan bahwa proporsi kedua belanja ini lebih besar pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2013 dengan tingkat persentase kenaikan belanja hibah sebesar 3,60 % dan belanja bantuan sosial sebesar 0,21%. Secara keseluruhan Pemerintah Daerah Kota Jambi tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 untuk belanja daerah didominasi oleh belanja operasi dengan meningkatnya pendapatan Daerah
4. Kinerja keuangan dilihat dari rasio pertumbuhan rata-rata PAD, pendapatan daerah, Pemerintah Daerah kota Jambi dari tahun 2011-2016 yakni 27,86% dan 14,91%, Ini menunjukkan bahwa kinerja pertumbuhan PAD Pemerintah Daerah Kota Jambi positif lebih baik dari pada pertumbuhan pendapatan daerah Pemerintah Daerah Kota Jambi. Dengan telah mampu mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhannya dari periode yang satu ke periode berikutnya. Sedangkan Pertumbuhan belanja modal, belanja operasi rata-rata sebesar 38,62% dan 11,37%.
5. Kinerja keuangan dilihat dari rasio kemandirian keuangan Daerah Kota Jambi tahun 2011-2016 adalah 18.36%. Ini berarti bahwa Penyelenggaraan desentralisasi di Kota Jambi masih sangat tergantung pada dana transfer dari pusat dan Propinsi.

5.2 Saran

Bertolak dari simpulan penelitian maka peneliti mencoba memberikan masukan atau pertimbangan berupa saran yakni untuk meningkatkan tingkat kemandirian keuangan Daerah, maka Kota Jambi harus semaksimal mungkin meningkatkan PADnya. Inisiatif dan kemauan pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan PAD, hendaknya Pemerintah Daerah Kota Jambi menggali potensi penerimaan PAD seperti meningkatkan jumlah wirausahawan dan mengembangkan BUMD. Bagi peneliti dan penelitian selanjutnya menambah analisis rasio efisiensi PAD, dan juga untuk mengembangkan fokus penelitian yakni menambah luas wilayah penelitian dengan menggunakan populasi yang lebih luas dan jumlah sampel yang lebih banyak, sehingga dengan demikian diharapkan hasil yang diperoleh akan lebih akurat.

DAFTAR REFERENSI

- Asmara, Jhon Andra. 2010. *Analisis Perubahan Alokasi Belanja Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apba) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol. 3. No. 2 Juli 2010 Hal. 155-172.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Erlangga: Jakarta.
- Bisma, I Dewa Gde dan Hery Susanto. 2010. *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*. Ganeç Swara Edisi Khusus Vol. 4 No.3, Desember 2010.
- Budi SP. Johan. 2004. *Cegah Dana Bansos dan Hibah dari Penyalahgunaan*. <https://www.kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan>. Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi. Diakses tanggal 30 November 2017.
- Dewi, Syukria, Restu Agusti Dan Rahmiati Idrus. 2015. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Kota Bukittinggi (Studi Di Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2009-2013)*. Jom Fekon Vol. 2 No. 2 Oktober 2015.
- Dinamika Pembangunan Kota Jambi 2016. *Visi dan Misi Kota Jambi (RPJMD 2013 – 2018)*. <http://jambikota.go.id/new/visi-dan-misi/>. diakses tanggal 06 November 2017.
- Fathah, Rigel Nurul. 2017. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Penilaian Kinerja Pada Pemerintah Daerah kabupaten Gunung Kidul*. E bank Vol. 8, No.1, Juni 2017 Halaman : 33 – 48. ISSN

- (Online) : 2442 – 4439 ISSN (Print) : 2087 – 1406.
- Fitriyani, Sadu.2017. *Pengaruh PAD, DAU dan SILPA Pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (Studi Pada Kabupaten / Kota Se Lampung Pada Tahun 2007-2012)*.Tesis. Universitas Lampung.
- Halim, A. Dan Abdullah, S. 2006. *Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintahan Daerah: Sebuah Peluang Penelitian Anggaran Dan Akuntansi*. *Jurnal Akuntansi Pemerintah* 2(1): 53-64.
- Hanum, Zulia.2011. *Analisis Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Kabupaten Serdang Bedagai* *Jurnal Manajemen & Bisnis* Vol 11 No. 01 April 2011 Issn 1693-7619 40.
- Jambi Dalam Angka 2014. *Kondisi Geografis Kota Jambi*. <http://jambikota.go.id/new/geografis/>. diakses tanggal 06 November 2017.
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset untuk bisnis & Ekonomi*. Erlangga: Jakarta.
- Machmud, Masita, George Kawung Dan Wensy Rompas.2014. *Analisis Kinerja Keuangan Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007-2012*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 14 No. 2 - Mei 2014.
- Mailoor Nanda Ertina Gabriella, Paul David Elia Saerang dan Harijanto Sabijono.2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur Tahun 2011-2014)*. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* Volume 16 No. 03 Tahun 2016.
- Maryono, R. 2013. *Pengaruh Perubahan Dana Alokasi Umum Terhadapperilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah*. *E-Jurnal UNP*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* Edisi Ketiga. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Nordiawan, Deddi. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta.
- Oktarina, M., Raharjo, K., & Andini, R. 2016. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kota Semarang (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2014)*. *Journal Of Accounting*, 2.
- Parwati, Sayu Made.2015. *Perilaku Oportunistik Penyusunan anggaran Di Kabupaten/Kota Se-Bali*. Tesis. Universitas Udayana.
- Purba, Sahala Dan Ruthmana Chiristin Hutabarat.2017. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dairi*. *Jurnal Ilmiah Kohesi* Vol. 1 No. 1 April 2017.
- Pramono, Joko. 2014. *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*. *Among Makarti*, Vol.7 No.13, Juli 2014.
- Rahayu, S., Wahyudi, I., & Yudi. 2009. *Analisis Kinerja Anggaran Keuangan Daerah Pemerintah Kota Jambi Di Lihat Dari Perspektif Akuntabilitas*. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi Seri Humaniora*, Volume 11 Nomor 2, , Hal. 25-30.
- Riharjo, Ikhsan Budi Dan Isnadi . 2010. *Perilaku Oportunistik Pejabat Eksekutif Dalam Penyusunan APBD (Bukti Empiris Atas Penggunaan Penerimaan Sumber Daya Alam)* . *Ekuitas* Vol. 14 No. 3 September 2010: 389 –ISSN 1411-0393.
- Ritonga, Irwan Taufiq dan Mansur Iskandar Alam.2010. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Apbd) Untuk Mencalonkan Kembali Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*. *Simposium Nasional Akuntasni XIII Purwokerto Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto*.
- Sanusi, A. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis* Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, Eko. 2011. *Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Ngawi*. Tesis Universitas Sebelas Maret.
- Sarwono, Jonathan.2006. *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Edisi Pertama. Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Sucandrawati, Ni Komang Ayu.2016. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Di Provinsi Lampung Sebelum Dan Setelah Pemekaran Wilayah*. Tesis. Program Magister Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ilmu Akuntansi Universitas Lampung.
- Suyono.2010. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Tesis Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Mokodompit, Sandy Sifrid S. Pangemanan dan Inggriani Elim.2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu*. *Jurnal*

- Emba 1521 Vol.2 No.2 Juni 2014, Hal. 1521-1527. ISSN 2303-1174.
- Syukriy Abdullah.2004. *Perilaku Oportunistik Legislatif Dalam Penganggaran Daerah: Pendekatan Principal-Agent Theory*. Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala 2004.
- Syauqi, Muhamad. 2016. *Strategi Meningkatkan Efisiensi Dan Efektivitas Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor Dalam Pengelolaan APBD*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Bogor.
- Tarmizi, Rosmiaty, Khairudin dan Ayu Jayadi .2014. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung Sebelum Dan Setelah Memperoleh Opini WTP*. Jurnal Akuntansi & Keuangan Vol. 5, No. 2, September 2014. Halaman 71-90.
- Usman.2012. *Analisis Perkembangan Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo*. Jurnal Pelangi Ilmu Vol 05, No 01, 2012.
- VIVAnews.2013. *Empat Kandidat Calon Walikota Daftar ke KPU Kota Jambi*. <http://www.viva.co.id/berita/nasional/398538-empat-kandidat-calon-walikota-daftar-ke-kpu-kota-jambi>. diakses tanggal 15 November 2017.
- Wenny, Cherrya Dhia.2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Dan Kota di Propinsi Sumatera Selatan*. Forum Bisnis Dan Kewirausahaan. Jurnal Ilmiah Stie Mdp Hal - 39 Vol. 2 No. 1 September 2012.
- Wonda, Welio.2016. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Masa Otonomi Daerah Kabupaten Nabire Provinsi Papua Analysis Of Financial Performance During Local Government District Autonomy Nabire Papua*. Jurnal Emba Vol.4 No.3 September 2016, Hal. 192-200. Issn 2303-1174.
- Winoto, Agus Hadi.2015. *Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Juni 2015, Vol. 12, No. 1, hal 75 – 91.
- Keputusan Walikota Jambi Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Penetapan Singkatan Nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Kota Jambi*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*.